

**HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR DPRD KOTASOLOK
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ATIA RAHAYU PUTRI
1710012111108

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

REG NO : 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

REG NO : 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Atia Rahayu Putri

Npm : 1710012111108

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara Kantor DPRD Kota Solok
Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.

(Pembimbing)



HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR DPRD KOTASOLOK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK

Atia Rahayu Putri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas BungHatta

E-mail : atiarahayu99@gmail.com

ABSTRACT

Solok City in the administration of government made Regional Regulation No. 1 of 2008 concerning the Ethics of Local Government of Solok City, research method used is Sociological Legal Research using Primary Data Sources and Secondary Data. Data Collection Techniques with Interviews and Document Studies, then Analyzed with Qualitative Analysis. The results of the study: 1) ASN rights have been fulfilled while only part of their obligations have been carried out. 2) Constraints faced by ASN in carrying out their rights and obligations are not optimal supervision of ASN and lack of socialization about Perda Ethics. 3) The efforts made by the local government of Solok City are to review Regional Regulation No. 1 of 2008 concerning the Ethics of Solok City Government.

Key Word : ASN, Solok City

I. PENDAHULUAN

Salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan dengan akselerasi nyata adalah Etika penyelenggara negara, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam pelaksanaan Pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pada pelaksanaan fungsinya pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan. Salah satu kerangka regulasi yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah¹, PERDA merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.² Pemerintah Kota Solok membuat PERDA Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok yang kemudian disebut sebagai PERDA Etika.

Rumusan Masalah :

1. Apakah Hak dan Kewajiban ASN Kantor DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Perda No.1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok
2. Apakah Kendala-Kendala yang dihadapi ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok
3. Apakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ASN Kantor DPRD Kota Solok Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian pada penelitian ini jenis penelitian Hukum Sosiologis yang

¹ Bappenas, *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007*, Jakarta 2007, hlm 6-7

² Kemenkumham Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima*, Jakarta 2011

merupakan proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dalam sosiologi dikenal sebagai sebuah ilmu.³

- B. Sumber Data, Data Primer dan Data Bahan Hukum Sekunder dan Tersier terdiri dari : buku-buku, hasil penelitian, Pendapat Sarjana.
- C. Teknik Pengumpulan Data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, Studi Dokumen, Wawancara.
- D. Analisis Data, Data hasil wawancara di edit sehingga lebih mudah dipahami kemudian diklasifikasikan menurut indikator yang telah ditentukan. a.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok

Sejalan dengan diterimanya hak, kewajiban ASN Kantor DPRD Kota Solok seharusnya juga harus dipenuhi oleh ASN tersebut. Namun pada kenyataan atau fakta dilapangan, kewajiban ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya hanya sebagian yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok. Kewajiban yang sering dilanggar oleh ASN di Kantor DPRD Kota Solok, antara lain :

1. Rendahnya tingkat disiplin ASN Kantor

DPRD Kota Solok.

2. Sebagian ASN Kantor DPRD Kota Solok tidak menjaga hubungan kerja yang professional dengan rekan kerjanya.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok dalam Melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok

Kendala tidak terpenuhinya kewajiban ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah :

1. Tidak maksimalnya pengawasan terhadap ASN di Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan.
2. Kurangnya sosialisasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok pada seluruh ASN Kantor DPRD Kota Solok terhadap aturan dan pasal-pasal yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok

C. Upaya - Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah

1. Pada tahun 2018 Pemerintah daerah Kota Solok mulai mendiskusikan kelanjutan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok melalui kegiatan Pengkajian Ulang yang akan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Daerah Kota Solok.

2. Pemerintah Kota Solok melakukan sosialisasi kepada ASN Kantor DPRD yang

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 19.

bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan dengan cara memanggil setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

IV. PENUTUP

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di lapangan serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan keterangan narasumber, dapat disimpulkan :

1. Hak ASN di Kantor DPRD Kota Solok berdasarkan Perda Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok terpenuhi sesuai dengan isi pada pasal-pasal yang ada, Sedangkan Kewajiban ASN di Kantor DPRD Kota Solok dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
2. Beberapa kendala yang menyebabkan ASN Kantor DPRD Kota Solok belum bisa mempertanggung jawabkan kewajibannya tersebut disebabkan karna kurangnya pengawasan dan efektifitas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok.
3. Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Solok melakukan pengkajian ulang terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok agar dapat merumuskan kebijakan apakah Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok perlu dirubah dengan catatan atau dihapuskan. Pemerintah Kota Solok melakukan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok kepada ASN Kantor DPRD Kota Solok yang disampaikan kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Agar Pemerintah Kota Solok melakukan peninjauan ulang terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota

Solok untuk mengontrol ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan.

2. Agar Pemerintah Kota Solok merumuskan kembali untuk merubah Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok

Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh ASN Kantor DPRD Kota Solok terhadap hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, dan membuat SOP mengenai hak dan kewajiban ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam menyelenggarakan pemerintahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing yang telah membantu menyelesaikan executive summary ini dengan baik. dan **Bapak Dr.Desmal Fajri, S.Ag.M.H** sebagai Ketua Bagian Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku-Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Bappenas, 2007, *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Jakarta.
Kemenkumham Republik Indonesia, 2011, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, Jakarta.
- B. Peraturan Perundangan
Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok.

